

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang keputusan pemerintah mengenai relokasi pedagang Pasar Barito, Jakarta Selatan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses formulasi pembuatan keputusan dan implementasi keputusan, ternyata pemerintah belum menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik, seperti prinsip partisipasi, transparansi, *equity*, *consensus orientation*, efisien dan efektif, dan *responsiveness*.. Hanya prinsip *rule of law* dan *strategic vision* saja yang cukup baik dilakukan oleh pemerintah walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya.
2. Dampak yang dialami pedagang akibat dari dikeluarkannya keputusan tersebut yaitu pedagang mengalami kerugian secara ekonomi, sosial dan psikologis. Secara ekonomi, kerugian ini mencakup kerugian berupa kehilangan dan rusaknya barang-barang dagangan, serta kerugian atas bangunan yang jika ditotal mencapai delapan miliar Rupiah. Secara sosial, kerugian ini seperti timbulnya pengangguran dan berkurangnya tingkat kesejahteraan pedagang. Sedangkan secara psikologis, kerugian yang dialami pedagang yakni perasaan sangat kehilangan akan tempat usaha yang telah didirikan selama kurang lebih tiga puluh tahun dan dikelola secara turun temurun dari keluarga. Kerugian psikologis lainnya yaitu rasa trauma dan ketakutan yang dirasakan oleh pedagang yang mengalami tindak kekerasan dari aparat keamanan saat eksekusi penertiban.

5.2 Saran

Untuk mewujudkan *good governance*, dibutuhkan kerja sama yang baik antar semua pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Terkait dengan penelitian ini, maka pihak yang secara langsung menjadi aktor adalah pemerintah dan pedagang Pasar Barito. Berikut beberapa saran bagi pemerintah dan pedagang Pasar Barito :

a. Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau keputusan, hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut terkait dengan proses pembuatan sebuah kebijakan atau keputusan :

1. Formulasi Pembuatan Kebijakan.

Dalam proses perumusan kebijakan hendaknya pemerintah melakukan hal-hal berikut :

a. Melakukan Kajian Mendalam.

Pemerintah hendaknya melakukan kajian secara mendalam terkait dengan kebijakan yang akan dibuat. Kajian yang mendalam dapat berupa penelitian yang melibatkan ahli di dalam bidang yang terkait dan juga pihak-pihak yang berhubungan dengan kebijakan yang akan dibuat. Sehingga dengan penelitian tersebut diperoleh data dan fakta yang akurat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan. Selain melakukan penelitian, pemerintah juga hendaknya dapat memperhitungkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai suatu kebijakan dengan jumlah anggaran yang dimiliki. Pemerintah dapat menunda dikeluarkannya suatu kebijakan manakala anggaran yang dibutuhkan belum mencukupi. Dengan kajian mendalam ini, pemerintah dapat memberikan skala prioritas terhadap sejumlah kebijakan yang akan dikeluarkan.

b. Melibatkan Seluruh *Stake Holder*.

Dalam proses pembuatan sebuah kebijakan, pemerintah hendaknya melibatkan secara langsung seluruh *stake holder* yang terkait. Proses pelibatan ini bukan sekedar mengetahui keinginan dari para *stake holder* saja, namun juga melaksanakan dari semua kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan yang meminimalisir kerugian. Proses pelibatan ini harus dilakukan dengan maksimal disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada.

c. Adanya Proses Yang Transparan Dan Jujur.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam membuat sebuah kebijakan, hendaknya melakukan semua proses dengan transparan dan jujur. Sehingga seluruh *stake holder* mengetahui proses pembuatan kebijakan

dengan baik. Dengan adanya proses ini diharapkan kebijakan yang akan dibuat memberikan dampak yang positif bagi seluruh pihak terkait.

2. Implementasi Kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan, pemerintah hendaknya membuat perencanaan yang matang dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait. Pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar petugas di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian materi dan non materi yang lebih besar.

b. Pedagang Pasar Barito

Untuk pedagang Pasar Barito yang saat ini berdagang di Pasar Inpres Radio Dalam, hendaknya berjualan dengan normal seperti pada saat berjualan di Pasar Barito yang saat ini sudah tidak ada. Dibutuhkan kesabaran dan kerja keras untuk mengembangkan Pasar Inpres Radio Dalam untuk menjadi seperti Pasar Barito. Pedagang juga hendaknya proaktif menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Kerja sama yang baik antara pedagang dan pemerintah menjadi modal utama untuk menjadikan Pasar Inpres Radio Dalam berkembang dan maju.